

## PERANGKAP KAPITALISME DALAM ADOPSI INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

**Yeterina Widi Nugrahanti**  
Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Kristen Satya Wacana

### ABSTRAK

*Kapitalisme* diyakini membawa keuntungan bagi pemilik modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dampak buruk yang ditimbulkannya bagi masyarakat luas juga lebih banyak, sehingga *kapitalisme* menciptakan jerat yang seolah tidak berujung. Akuntansi sebagai bagian dari perekonomian juga tidak lepas dari *kapitalisme*. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perangkat *kapitalisme* yang melekat dalam *adopsi International Financial Reporting Standard* (IFRS). Adapun perangkat *kapitalisme* yang melekat dalam *adopsi* IFRS antara lain (a) semakin terbukanya peluang bagi investor asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia, (b) semakin terbukanya peluang bagi sistem perekonomian *kapitalisme* untuk menggantikan sistem perekonomian kekeluargaan yang diamanatkan oleh UUD 1945, (c) *fair value accounting* dalam IFRS menyediakan instrumen bagi keserakahan akumulasi laba, (d) *adopsi* IFRS mendorong Indonesia untuk terlibat dalam pasar global sehingga memperlancar *'flow of things capitalism'*, yang berdampak pada akumulasi uang (laba) sebagai satu-satunya tujuan dan pengabaian "nilai" yang lain, termasuk nilai moral. Berbagai upaya untuk mengimbangi perangkat *kapitalisme* dalam *adopsi* IFRS dapat berupa peningkatan pembelajaran etika akuntan yang disesuaikan dengan ideologi Indonesia dan nilai Ketuhanan, pengembangan proses bisnis dan praktik akuntansi yang berlandaskan pada nilai keagamaan, dan pengembangan wacana akuntansi kritis sebagai sarana penyadaran mengenai dampak buruk *kapitalisme*.

**Kata kunci:** perangkat *kapitalisme*, akuntansi, *adopsi* IFRS

### ABSTRACT

*Capitalism is believed to bring profit to the owners of capital and encourage economic growth, but the bad impact it generates for the wider community is also more so that capitalism creates a seemingly endless snare. Accounting as part of the economy also can not be separated from capitalism. This article aims to explain the traps of capitalism inherent in the adoption of the International Financial Reporting Standard (IFRS). The traps of capitalism inherent in the adoption of IFRS include (a) increasing opportunities for foreign investors to exploit the natural resources and human resources in Indonesia, (b) the opening of opportunities for the capitalist economic system to replace the family economy system mandated by the Constitution 1945, (c) fair value accounting in IFRS provides an instrument for profit accumulation greed, (d) IFRS adoption encourages Indonesia to engage in global markets so as to facilitate 'flow of things capitalism', which affects the accumulation of money (profit) as the sole Goals and other "value" waivers, including moral values. Efforts to compensate for the trap of capitalism in IFRS adoption can be an increase in the ethics of accountants' learning adapted to the ideology of Indonesia and the value of the Godhead, the development of business processes and accounting practices based on religious values, and the development of critical accounting discourse as a means of awareness of the adverse effects of capitalism.*

**Keywords:** trap of capitalism, accounting, adoption of IFRS

### PENDAHULUAN

*Kapitalisme* merupakan suatu paham dimana kapital sebagai dasar kehidupan sosial. Manusia sebagai tenaga kerja dalam kegiatan bisnis diposisikan sebagai alat produksi. Laba merupakan hasil dari kapital, dan dimiliki oleh pemilik kapital (kaum *kapitalis*). Kaum kapitalis mengakumulasi laba menjadi kapital baru untuk mencipta laba baru, demikian seterusnya, se

hingga kapital berkembang pesat menguasai kehidupan manusia (Priyono, 2007). Kapitalisme telah berkembang selama berabad-abad. Dalam perkembangannya, *kapitalisme* senantiasa mengalami perubahan, karena sifatnya yang adaptif terhadap kebutuhan lingkungan, baik lingkungan ekonomi maupun sosial politik maka *kapitalisme* dapat bertahan dan terus mengakar dalam kehidupan manusia. Hal inilah yang kemudian memunculkan frasa "*Capitalism is*

*dead, long live capitalism* (Kaletsky, 2010). *Kapitalisme* pada awalnya muncul pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan tulisannya yang berjudul *The Wealth Of Nation*. Dalam buku tersebut diyakini adanya kekuatan “*invisible hand*” yang dapat mengatur perekonomian. Pemerintah harus keluar dari bisnis dan membiarkan perdagangan dan pasar bebas memandu perekonomian. Dengan demikian per ekonomian dan kemakmuran diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

Dari awal perkembangannya sampai dengan sekarang, *kapitalisme* telah menguasai segala aspek kehidupan baik bidang ekonomi maupun non ekonomi. *Kapitalisme* diyakini dapat membawa kehidupan manusia ke arah yang lebih baik, tetapi dampak buruk *kapitalisme* melebihi manfaat yang diberikan *kapitalisme* bagi manusia. Khobir (2010) menyatakan bahwa dampak positif *kapitalisme* antara lain (1) Adanya mekanisme pasar bebas akan mendorong aktifitas dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan; (2) Persaingan bebas akan mewujudkan produksi dan harga ke tingkat harga wajar dan rasional; (3) Pelaku ekonomi akan termotivasi untuk mencapai prestasi yang terbaik, karena pelaku yang tidak memberikan kinerja yang terbaik akan tersingkirkan.

Di sisi lain, *kapitalisme* banyak dikritik karena (1) *Kapitalisme* menimbulkan berbagai macam bahaya dan ketidakadilan. Kaum kapitalis beranggapan bahwa hak kepemilikan mereka atas suatu sumber daya yang dapat terhubung ke pasar bebas merupakan hal yang wajar dan mereka tidak mau mengakui bahwa banyak orang yang kehilangan dan menderita akibat adanya pasar bebas. (2) *kapitalisme* menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam mengejar keuntungan, banyak pihak menyebabkan kerusakan lingkungan dan kemudian membebankan kerusakan tersebut kepada pihak lain. Oleh sebab itu, *kapitalisme* disebut sebagai paham yang irasional karena dapat membahayakan dan melukai orang lain; (3) *Kapitalisme* melestarikan kemiskinan dan pengangguran. Pengangguran merupakan sesuatu yang akan terus ada dalam sebuah masyarakat yang didorong untuk mencetak keuntungan. Aktivitas produksi ditujukan untuk menghasilkan barang yang murah (dalam jumlah yang banyak) dengan cara yang

secepat mungkin. Sehingga pemilik modal dan perusahaan dapat memaksimalkan laba mereka. Ketika jumlah barang melimpah dan perusahaan tidak dapat menjual barang mereka, maka perusahaan akan mengurangi jumlah produksi, yang berarti mengurangi jumlah buruh yang berakibat pada banyaknya pengangguran dan kemiskinan (Habermas, 1988; Hafizah, 2004; Dunne, 2012).

Dengan melihat dampak positif dan negatif *kapitalisme* di atas maka dapat dikatakan bahwa *kapitalisme* seperti sebuah perangkat yang tak berujung. Pihak yang dapat menikmati dampak positif dari *kapitalisme* adalah kelas tertentu dari masyarakat, yaitu para pemilik modal sedangkan pihak yang merasakan dampak negatif dari *kapitalisme* adalah masyarakat dan kelas sosial yang tidak memiliki modal. Dimana jumlah masyarakat yang tidak memiliki modal lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilik modal dan mereka membutuhkan pekerjaan dari para pemilik modal.

Akuntansi sebagai bagian dari perekonomian juga dipengaruhi oleh *kapitalisme*. Proses dan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi ditujukan bagi pemilik modal agar mereka mengetahui bagaimana proses dan hasil pengelolaan kekayaan mereka. Standar akuntansi keuangan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan juga tidak lepas dari *kapitalisme*, karena standar akuntansi tersebut diproduksi di negara penganut paham *kapitalisme*. Pada awalnya standar akuntansi Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/PSAK) mengacu pada standar akuntansi Amerika (US GAAP) yang menganut *rules based*, dimana praktik akuntansi diatur secara detail. Sejak tahun 2008, Ikatan Akuntan Indonesia mulai mencanangkan pengadopsian IFRS (*International Financial Reporting Standard*) secara bertahap dan mengadopsi penuh pada tahun 2012. IFRS ini menganut *principle based* dan mempermudah investasi antar negara karena standar yang dianut sama. Sehingga muncul anggapan bahwa pengadopsian IFRS ini akan semakin memperkuat *kapitalisme* di Indonesia, karena IFRS mempermudah pemilik modal asing untuk berinvestasi dan mengakumulasi modal di Indonesia. Dengan demikian akuntansi juga berkontribusi dalam memperlebar perang

kap *kapitalisme* dan kesenjangan antar kelas pemilik modal dan non pemilik modal.

Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengadopsian IFRS yang dilakukan oleh IAI berkontribusi dalam mereproduksi dan memperlebar perangkat *kapitalisme*. Pembahasan artikel ini akan mencakup perkembangan *kapitalisme*, akuntansi dan *kapitalisme*, perkembangan standar akuntansi di Indonesia, analisis perangkat *kapitalisme* dalam IFRS, solusi untuk mengimbangi *kapitalisme* dan penutup.

## PEMBAHASAN

### Perkembangan *Kapitalisme*

Kaletsky (2010) menjelaskan perkembangan *kapitalisme* dari awal munculnya (*kapitalisme* 1.0) hingga eksistensinya sampai dengan sekarang (*kapitalisme* 4.0). Sejarah *kapitalisme* 1.0 dimulai sejak tahun 1776 hingga 1932. Periode ini ditandai dengan publikasi *The Wealth of Nations : An Inquiry into the Nature and Causes* yang ditulis oleh Adam Smith pada tahun 1776. Buku ini menyatakan bahwa keserakahan individu tidak bertentangan dengan kepentingan umum karena keserakahan harta benda akan mendorong orang bekerja keras untuk mencari keuntungan pribadi. Akibatnya dia akan memproduksi lebih banyak barang atau menjual lebih banyak jasa. Keserakahan satu orang akan diimbangi oleh keserakahan orang lain sehingga akan timbul kompetisi yang sehat (Nawatmi, 2009). Di Eropa, prinsip *kapitalisme* 1.0 adalah *laissez-faire* (persaingan bebas). Prinsip ini memperkuat keyakinan bahwa pemerintah harus tetap keluar dari bisnis dan membiarkan perdagangan dan pasar bebas memandu kemajuan ekonomi. Adanya *invisible hand* akan memandu efisiensi ekonomi.

Periode *kapitalisme* 2.0 terjadi pada 1931-1980. Depresi Besar yang melanda dunia pada tahun 1930-an menandai terjadinya perubahan radikal dalam pemikiran politik dan ekonomi. Pada periode ini, John Maynard Keynes (1936) menerbitkan buku yang berjudul *General Theory of Employment, Interest and Money*. Buku ini menjadi pedoman bagi *kapitalisme* pada tahap ini. Untuk bertahan hidup, kapitalisme harus memperbaiki kesenjangan mengerikan

dan mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam menghadapi *nazisme* dan *fasisisme*. Karakteristik utama dari *Kapitalisme* 2.0 adalah pengakuannya bahwa *kapitalisme* yang tidak terkendali akan berbahaya, sehingga pemilihan “pemerintah yang penurut dan kompeten” untuk mengelola ekonomi merupakan cara penting untuk menghilangkan “kekacauan tak terelakkan dari pasar bebas.” Ekonomi Keynesian mencapai puncaknya pada 1946-1969, yang merupakan periode paling sukses dalam pengelolaan ekonomi, yang meliputi perbaikan standar hidup, kemajuan teknologi dan stabilitas keuangan dalam sejarah dunia. Di sisi lain, pada periode *kapitalisme* 2.0 juga terjadi pengeluaran besar-besaran AS pada Perang Vietnam, serta inflasi dan terorisme di Eropa yang semakin meningkatkan tekanan keuangan. Pada tahun 1971, AS memisahkan nilai dolar dari emas, menggetarkan sistem moneter global. Harga minyak melonjak selama *embar go* minyak oleh Arab pada tahun 1973. Hal ini berakibat pada tingginya tingkat pengangguran dan inflasi, serta merosotnya pertumbuhan ekonomi ke arah *stagflasi* pada tahun 70-an.

*Kapitalisme* 3.0 terjadi pada tahun 1979-2008. Pada periode ini *kapitalisme* Keynesian mendapatkan kritik yang sangat tajam, karena ketidakberhasilannya membendung inflasi yang sangat tinggi. Pada masa ini muncul paham *monetarisme* yang didukung oleh Milton Friedman, yang menyatakan bahwa pasar bebas akan selalu melakukan pekerjaan dengan lebih baik dari pada negara, dalam mempertahankan *full employment* dan keseimbangan ekonomi. Inflasi menghebohkan tahun 1970-an adalah bukti ketidakmampuan pemerintah mengelola ekonomi, sehingga ini merupakan kegagalan dari *kapitalisme* Keynesian. Permintaan kelompok pekerja dan pemilik bisnis pada negara untuk mencetak uang guna mengakomodasi pertumbuhan upah dan *full employment* mendorong pemerintah mencetak uang terlalu banyak sehingga mengakibatkan inflasi tinggi. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menghentikan inflasi adalah membiarkan pengangguran meningkat dan menyingkirkan pemerintah dari perekonomian. Pada *kapitalisme* 3.0 juga muncul konsep *fundamentalisme* pasar, yaitu adanya kepastian bahwa pasar benar dan pemerintah yang salah.

Terjadinya krisis keuangan global yang bermula dari kebangkrutan industri keuangan di Amerika pada tahun 2008 mendorong munculnya *kapitalisme* 4.0 sampai dengan saat ini. *Kapitalisme* 4.0 diyakini akan mengantarkan masyarakat ke arah ekonomi campuran yang adaptif. Disebut *adaptif*, karena secara *fleksibel* akan mengubah struktur, peraturan dan pe-mikirannya untuk merespons perubahan per-kembangan. Disebut campuran karena dapat me-nyatukan kepentingan negara dan swasta untuk memungkinkan pasar bebas dan terkendali pada saat bersamaan. Artinya, pemerintah akan lebih banyak mengendalikan industri keuangan karena dunia perbankan penuh dengan ketidakpastian dan memerlukan pengawasan. Masyarakat juga tidak dapat membuat keputusan tentang keman-dirian energi semata-mata berdasarkan meka-nisme pasar (Kaletsy, 2010). Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa *kapitalisme* dapat bertahan hidup karena sangat *fleksibel* terhadap per-ubahan jaman.

### Akuntansi dan *Kapitalisme*

Beberapa tokoh sejarah ekonomi me-nyatakan keterkaitan akuntansi dan *kapitalisme*, sistem pembukuan berpasangan yang merupakan produk akuntansi merupakan sesuatu yang penting dan vital bagi perkembangan dan evolusi *kapitalisme*. Chiapello (2007) menekankan bahwa akuntansi memiliki peranan yang sangat penting dalam melanggengkan kapitalis-me. Belkaoui (2000) menyebutkan bahwa kaitan antara akuntansi dan *kapitalisme* ini dikenal dengan tesis Sombart. Sombart (1919) menge-mukakan dua karakteristik utama *kapitalisme*, yaitu: maksimalisasi laba dan tindakan ekonomi yang rasional. Perusahaan kapitalis merupakan alat untuk mencapai laba dan pembukuan ber-pasangan dalam akuntansi berperan penting dalam penciptaan perusahaan kapitalis ini. Peranan pembukuan berpasangan dalam kapi-talisme adalah (a) pemisahan antara pemilik dan perusahaan yang memungkinkan perusahaan tumbuh menjadi korporasi besar dan (b) aliran modal secara utuh melalui entitas bisnis, yaitu dari akun Modal menuju berbagai akun nominal dalam Laporan Laba Rugi dan akhirnya kem-bali ke akun Modal.

Selain itu, Sombart (1919) dalam Suyudi (2012) juga menyatakan bahwa akuntansi mem-pengaruhi aspek rasionalitas ekonomi dalam konsep *kapitalisme* sebagai berikut: (a) Akun-tansi menyederhanakan proses *kalkulasi* untuk produksi dan konsumsi, karena hanya transaksi yang memengaruhi perusahaan yang akan dicatat, (b) Akuntansi memungkinkan analisis kegiatan operasi perusahaan dan penyusunan rencana bagi perbaikan perusahaan, (c) Akun-tansi berperan dalam penyusunan rerangka *konseptual* untuk menjelaskan sifat sistem ekonomi kapitalis melalui pembentukan istilah-istilah seperti aset, kewajiban, harga pokok produksi, pendapatan, beban, dan laba.

Karl Marx sebagai tokoh yang menentang *kapitalisme* menyatakan bahwa akuntansi me-rupakan bagian dari ideologi kapitalis. Akun-tansi merupakan alat untuk melegiti masi-keadaan, struktur sosial ekonomi, dan politik kapitalis. Akuntansi merupakan wujud ke-sadaran palsu dan merupakan alat untuk memistikkan dan bukan memberikan informasi yang benar tentang hubungan sosial yang mem-bentuk lembaga produksi (Harahap, 2001). Akuntansi merupakan salah satu alat yang memiliki kekuatan untuk menopang *kapitalisme* serta melegitimasinya. Akuntansi memberikan prioritas kepada kekuatan-kekuatan pemilik modal untuk menguasai kehidupan ekonomi seluruh masyarakat dengan pengendalian dan pengaturan-pengaturannya.

Triuwono (2000) menyatakan bahwa bila akuntansi dilahirkan dalam lingkungan kapita-listik, maka informasi yang disampaikan mengandung nilai-nilai *kapitalistik*. Kemudian keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil seseorang yang berdasarkan pada informasi ini juga mengandung nilai-nilai *kapitalistik*. Akhir-nya realitas yang diciptakan adalah realitas kapi-talistik. Singkatnya, informasi akuntansi yang *kapitalistik* akan membentuk jaringan kuasa *kapitalistik*. Jaringan kuasa inilah yang akhirnya mengikat dan memilin manusia dalam samsara *kapitalisme*.

Belunggu *kapitalisme* juga melekat dalam standar akuntansi yang digunakan sebagai landa-san praktik akuntansi, termasuk dalam standar akuntansi yang diterapkan di Indonesia (PSAK), karena PSAK mengacu pada standar akuntansi

negara kapitalis. Sebagai contoh adalah tujuan pelaporan keuangan menurut PSAK 2002 yang mengacu pada tujuan pelaporan keuangan *International Accounting Standards Committee* (IASC). Tujuan pelaporan keuangan yang tercantum dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan PSAK 2002 adalah (1) menyediakan informasi yang menyangkut posisi dalam menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. (2) Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. (3) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa tujuan pelaporan keuangan merupakan penerapan dari nilai kapitalis (Adam, 2008), yaitu nilai-nilai rasional sehingga pelaporan keuangan ditujukan untuk “sebagian besar” pemakai laporan keuangan, dalam konteks ini adalah pemilik modal (pemegang saham dan kreditur). Selain itu, laporan keuangan juga ditujukan untuk mengambil keputusan ekonomi, yaitu maksimalisasi laba dengan biaya seefisien mungkin. Konsep ini menganggap upah buruh sebagai biaya, padahal buruh merupakan komponen yang sangat penting dalam produksi. Jika akuntansi kapitalis hanya mengutamakan pemilik modal, maka akan selalu muncul konflik antara pemilik dengan buruh maupun dengan *stake holder* lainnya. Keputusan ekonomi yang didasarkan pada laporan keuangan ditempatkan sebagai prioritas dan mengesampingkan aspek lain seperti aspek sosial dan akuntabilitas. Seiring dengan perkembangan bisnis dan globalisasi, standar akuntansi di Indonesia juga mengalami perubahan, tetapi nilai-nilai *kapitalisme* tetap ada di dalamnya.

### Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia

Akuntansi merupakan instrumen yang mereproduksi *kapitalisme* karena proses dan output akuntansi berupa laporan keuangan mendukung maksimalisasi laba dan tindakan ekonomi rasional. Perkembangan standar akuntansi di Indonesia yang mengikuti perubahan lingkungan bisnis juga tidak terlepas dari nilai *kapitalisme*. Hal ini disebabkan standar akuntansi Indonesia mengacu pada standar akuntansi negara kapitalis. Pada awalnya, IAI memutuskan bahwa PSAK mengacu pada standar akuntansi Amerika (*United States Generally Accepted Accounting Standard/US GAAP*). Gamayuni (2009) menyatakan bahwa era globalisasi menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara. Tujuan penerapan standar akuntansi internasional adalah untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan meningkatkan investasi antar negara. IAI mulai mencanangkan pengadopsian standar akuntansi internasional (*International Financial Reporting Standards/IFRS*) secara bertahap sejak tahun 2008 dan pengadopsian penuh dilakukan pada tahun 2012. Pengadopsian IFRS mempermudah para pemilik modal untuk meng ekspansi kekuasaannya di pasar modal negara lain, sehingga dapat dikatakan standar akuntansi semakin memperumit jerat *kapitalisme*.

Indonesia sudah mengenal aturan akuntansi sejak masa penjajahan Belanda. Aturan tersebut terus berkembang saat Indonesia merdeka sampai dengan pengadopsian penuh IFRS. Berikut ini adalah perkembangan standar akuntansi di Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, 2008):

- a) Selama masa penjajahan Belanda, Indonesia belum memiliki standar akuntansi yang spesifik. Untuk menyajikan informasi, Indonesia menggunakan standar gaya Belanda yang disebut dengan *Sound Business Practices*. Indonesia masih menggunakan standar gaya Belanda ini hingga merdeka di tahun 1945 hingga tahun 1955.
- b) Pada tahun 1955, Indonesia sudah mulai meninggalkan gaya Belanda dan mulai beralih ke standar akuntansi Amerika,

tetapi Indonesia belum mempunyai undang – undang resmi / peraturan tentang standar keuangan.

- c) Pada tahun 1973 menjelang diaktifkannya pasar modal Indonesia, untuk pertama kalinya IAI yang didirikan pada tahun 1957 melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Standar tersebut dinamakan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).
- d) Pada tahun 1984, komite PAI melakukan revisi secara mendasar atas PAI tahun 1973 dan kemudian mengkodifikasikannya dalam buku “Prinsip Akuntansi Indonesia 1984” dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dan dunia usaha.
- e) Pada tahun 1994, IAI melakukan revisi total PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku “Standar Akuntansi Keuangan 1994” per 1 Oktober 1994. Sejak tahun 1994 IAI juga telah memutuskan dan berkomitmen untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan dalam harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi *adopsi* dalam rangka *konvergensi* dengan *International Financial Report Standards* (IFRS).
- f) Pada tahun 2008, IAI mulai mencanangkan mengadopsi IFRS secara bertahap, perbedaan antara PSAK dengan IFRS diharapkan akan dapat diselesaikan
- g) Program *adopsi* penuh dalam rangka mencapai *konvergensi* dengan IFRS terlaksana pada tahun 2012.

Dengan diadopsinya IFRS, maka standar akuntansi Indonesia saat ini sudah berlandaskan pada standar akuntansi internasional.

### **Perangkap Kapitalisme dalam IFRS**

Akuntansi bisa membentuk dan dibentuk oleh lingkungan di mana akuntansi tersebut dikembangkan. Standar akuntansi yang berkem-

bang di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk perkembangan lingkungan bisnis, perkembangan standar akuntansi di negara lain dan globalisasi. Menanggapi globalisasi, sejak tahun 2008, IAI menetapkan akan melakukan *adopsi* IFRS. Pengadopsian IFRS membuat peran Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI sebagai penyusun Standar Akuntansi Keuangan mengalami perubahan.

Dewan tidak lagi bertugas merumuskan atau menyusun standar baru namun menerjemahkan IFRS/*International Accounting Standard* (IAS) untuk dilihat apakah sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Jika diperlukan Dewan, akan menambahkan atau mengurangi beberapa bagian IFRS (Martani, 2008). IFRS merupakan standar akuntansi yang dikembangkan oleh para pemikir barat dimana *kapitalisme* menjadi ideologi yang telah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Karena berlandaskan *kapitalisme*, maka IFRS dapat digunakan untuk mengakumulasi kapital bagi kepentingan individu, yang dalam akuntansi disebut sebagai pemilik modal, baik investor maupun kreditur.

Salah satu manfaat dari penerapan IFRS yang seringkali dibangga-banggakan oleh IAI adalah memudahkan pemahaman atas laporan keuangan negara lain karena disusun menggunakan standar yang sama sehingga akan meningkatkan arus investasi global. Dari satu sisi, peningkatan investasi global mungkin akan mendorong produksi sehingga memperluas lapangan kerja di Indonesia. Tetapi di sisi lain, peningkatan investasi global juga merupakan bentuk penjajahan baru dari *kapitalisme*. Dengan adanya investasi global, investor asing akan menguasai sumber daya di Indonesia. Bahkan mereka dapat dianggap sah untuk melakukan eksploitasi terhadap pekerja dan sumber daya alam Indonesia dengan dalih efisiensi untuk menciptakan laba sebesar-besarnya. Sumber daya alam yang seharusnya dikuasai oleh negara dapat dikuasai oleh pihak asing. Pekerja Indonesia dapat dijadikan budak mesin yang harus bekerja keras selama 24 jam dan hasil kerja keras tersebut akan dinikmati oleh para pemilik modal asing. Dengan demikian pengadopsian IFRS memungkinkan perampokan sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia atas nama investasi asing. Keuntungan yang dihasilkan dari

adopsi IFRS dan investasi asing hanya merupakan bagian kecil dibandingkan dengan kejahatan *kapitalisme* yang semakin menjebak Indonesia.

Pengadopsian IFRS yang meningkatkan investasi global pada dasarnya bertentangan dengan konstitusi Indonesia, khususnya pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Ayat ini mengindikasikan dengan jelas bahwa asas kekeluargaan menjadi landasan sistem per ekonomian Indonesia. Kemudian pasal 33 ayat 2 menjelaskan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, dan dilanjutkan pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Para pendiri bangsa Indonesia menempatkan asas kekeluargaan sebagai landasan dan sistem perekonomian Indonesia, tetapi pengadopsian IFRS memandu sistem perekonomian Indonesia menuju sistem per ekonomian kapitalis. Pengadopsian IFRS yang mendorong peningkatan investasi asing dapat mengalihkan penguasaan sumber daya alam yang seharusnya dikuasai oleh pemerintah menjadi milik pe modal asing. Investasi global mempermudah pe modal asing mengeruk kekayaan Indonesia. Dengan demikian pengadopsian IFRS menjebak Indonesia untuk mengingkari konstitusinya sendiri.

Dari segi konten, IFRS memiliki tiga ciri utama yang membedakannya dengan standar akuntansi US GAAP yang sebelumnya dianut oleh Indonesia (Martani, 2008). Ciri tersebut dijelaskan sebagai berikut (a) IFRS menganut *principles based*, standar yang bersifat *principles based* hanya mengatur hal-hal prinsip bukan aturan detail. Sehingga penerapan IFRS memerlukan lebih banyak *professional judgment*. Akuntan harus memiliki pengetahuan, keahlian dan etika agar dapat memberikan *professional judgment* yang tepat. (b) Pengadopsian IFRS menekankan pada penggunaan nilai wajar untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan sebagai alternatif penggunaan nilai historis. Dalam IFRS penggunaan nilai wajar diperluas untuk aset tetap, aset tidak berwujud, bahkan untuk aset

biologi (contoh tanaman atau hewan ternak). (c) Pengadopsian IFRS mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih luas agar pemakai laporan keuangan mendapatkan informasi yang lebih banyak sehingga dapat mempertimbangkan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pengadopsian IFRS memperluas penggunaan akuntansi nilai wajar. Penggunaan nilai wajar pada dasarnya dilandaskan pada motivasi untuk memberikan informasi yang relevan kepada para pemilik modal tentang besarnya akumulasi modal yang mereka miliki. Menurut Stojilkovic (2010), *fair value accounting* merupakan hasil penelitian ilmiah akuntansi keuangan terkait dengan elemen pelaporan keuangan. Akuntansi nilai wajar adalah produk neoliberal *kapitalisme* Amerika. Keserakahan untuk menciptakan laba yang besar pada harga berapapun dan secepat mungkin merupakan pondasi yang bermanfaat bagi perkembangan akuntansi nilai wajar (Richard, 2015). Nilai wajar dibanggakan oleh IFRS karena diklaim dapat meningkatkan relevansi informasi akuntansi. Salah satu contoh penerapan nilai wajar adalah nilai wajar instrumen keuangan, yang memperbolehkan pengakuan *unrealized gain* dalam laporan laba rugi sebelum laba tersebut teralisasi dalam transaksi penjualan yang riil. Tujuan utama akuntansi nilai wajar adalah adanya pengakuan *unrealized gain*. *Unrealized gain* ini akan memperbesar akumulasi laba pemilik modal, yang merupakan salah satu ciri *kapitalisme*. Nilai wajar bukan hanya berasal dari harga pasar saja tetapi juga harga berdasarkan metode dan teknik penilaian (*assessment*). Semakin besar proporsi nilai wajar yang diperoleh melalui teknik *assessment*, maka semakin rendah validitas informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan karena tingginya kemungkinan manipulasi (Stojilkovic, 2010).

Dengan demikian nilai wajar yang dibanggakan oleh IFRS dapat meningkatkan relevansi informasi akuntansi dan dapat meningkatkan akumulasi modal, juga sekaligus menjebak akuntan dalam peluang untuk berperilaku *amoral* dan menurunkan *validitas* informasi keuangan itu sendiri.

Mulawarman (2009) dan Sulistyowati (2010) menjelaskan bahwa penerapan IFRS mendorong suatu negara untuk masuk ke dalam

globalisasi *liberalisasi financial market*. Palea (2015) menjelaskan bahwa pelaporan keuangan dan IFRS merupakan *powerful practice* yang dapat membentuk proses sosial dan ekonomi. Standarisasi pelaporan keuangan akan mem perkokoh dan meningkatkan *kapitalisme* dalam pasar modal. Burchell, Club, Hopwood dan Hughes (1980) dalam artikelnya yang berjudul *The roles of Accounting in Organizations and Society* menyatakan bahwa akuntansi, termasuk IFRS, digunakan untuk memenuhi dua tujuan, baik kepentingan internal organisasi maupun praktik sosial yang lebih luas. Fungsi akuntansi untuk kepentingan internal organisasi misalnya mengurangi ketidakpastian terkait keputusan perusahaan, merasionalisasi keputusan masa lampau, sarana pembelajaran, senjata menghadapi konflik politis, dan sebagainya. Dalam praktik sosial yang lebih luas, inovasi akuntansi

menjawab kebutuhan perluasan praktik kalku latif yang terdapat dalam masyarakat dimana organisasi berada.

Graham dan Neu (2003) menyebutkan bahwa pengadopsian IFRS berdampak pada me luasnya perubahan akuntansi berupa teknologi akuntansi dan perubahan bentuk perusahaan menjadi perusahaan supranasional. Dalam per usahaan supranasional terjadi penyesuaian tekno logi akuntansi yang melibatkan “aliran lintas batas melampaui ruang dan waktu” (*cross-border flows beyond time and space*), yang me liputi aliran modal, produk, informasi, kebijakan dan manusia. Aliran tersebut juga melibatkan peranan organisasi internasional seperti IASB, IMF, WTO dan sebagainya.

“*Flow of things capitalism*” tersebut di gambarkan oleh Graham dan Neu (2003), sebagai berikut:

| <i>Flows of 'Things'</i> | <i>Organizations Involved</i>                   | <i>Examples</i>  |
|--------------------------|---|--|
| Capital                  | International financial markets<br>IASB         | Currency and securities trading<br>Harmonization of accounting standards |
| Products                 | IMF   | Currency and market liberalization                                       |
| Information              | WTO<br>OECD                                     | Myriad goods and services<br>Performance indicators                      |
| Policies                 | W3C, NSF  | Internet standards   |
| People                   | IMF, World Bank<br>National governments<br>OECD | Lending conditionalities<br>Immigration policies<br>Labour migration     |

Sulistyowati (2010) menyebutkan bahwa salah satu kepentingan IFRS adalah untuk me mastikan arus kas perusahaan “bermain mono poli” dalam berbagai *flow of things* di atas. Laporan arus kas perusahaan digunakan sebagai alat bantu untuk memetakan kekuatan keuangan perusahaan, untuk mengantisipasi “mesin dadu” atau *Electronically Operated Global Casino* dalam bursa pasar modal, yang nantinya dapat menyebabkan *automaton* (Capra, 2002). *Automaton* merupakan hasil proses globalisasi ke uangan yang secara tegas mengatur kehidupan manusia. Mesin-mesin globalisasi berbentuk transaksi keuangan elektroniklah yang meng ambil alih dunia manusia. Pasar global pada dasarnya bukan merupakan pasar tetapi merupa kan serangkaian mesin yang diprogram dengan satu tujuan/nilai tunggal, yaitu menghasilkan

uang dengan mengabaikan semua nilai yang lain. Logika automaton bukanlah aturan-aturan pasar tradisional. Dinamika aliran ke uangan yang digerakkannya saat ini di luar kendali-kendali pemerintahan negara, perusaha an-perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan. Dengan demikian adopsi IFRS yang merupakan salah satu alat sistem *kapitalisme* telah meng antar Indonesia menuju pasar global dan men jebak . Uang merupakan tujuan utama dalam pasar global yang penuh dengan nafsu *kapitalis me*.

*Kapitalisme* yang mendorong penekanan berlebihan pada individualism serta maksimali sasi laba akan menciptakan masyarakat yang tidak mempedulikan rasa kemanusiaan, persau daraan, kerjasama, dan meninggalkan sosial budaya (Triyuwono, 2000). Jika kondisi ini



dibiarkan, maka akuntansi akan mengalami krisis, ditinggalkan pemakainya dan kemudian dimasukkan dalam museum peradaban. Parker (1990) dalam Hafizah (2004) menekankan perlunya perubahan dalam akuntansi dari penekanan pada *decision making* beralih kepada *accountability*. Selain itu, akuntansi tidak hanya memberikan informasi kuantitatif tetapi juga kualitatif.

Dari pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa pengadopsian IFRS semakin membawa akuntan dan pelaku bisnis di Indonesia kepada *kapitalisme*. Sehingga jika tidak diantisipasi, maka dampak buruk *kapitalisme*, yaitu mengejar laba dengan menghalalkan segala cara juga akan terus membayangi perekonomian dan proses akuntansi di Indonesia. Pelaku bisnis yang merupakan pemilik modal dapat terus meningkatkan kekayaan mereka, sedangkan para pekerja dan sumber daya alam akan selalu di peras untuk mendapatkan laba. Untuk mengimbangi semakin meluasnya *kapitalisme* yang melekat dalam adopsi IFRS dibutuhkan suatu solusi yang tepat dan komprehensif, yang berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh Indonesia sendiri.

### **Solusi untuk Mengimbangi Kapitalisme dalam Adopsi IFRS**

Pengadopsian IFRS mungkin merupakan suatu tantangan yang sulit untuk dihindari agar Indonesia terus diperhitungkan dan terlibat dalam kancah perekonomian dunia. Sebagai konsekuensinya, *kapitalisme* yang dibawa oleh IFRS juga akan semakin mengempakkan sayap kejayaannya. Untuk mengimbangi *kapitalisme* yang terus meluas, beberapa hal dapat dilakukan oleh akuntan Indonesia. Pertama, peningkatan pembelajaran etika bisnis dan etika akuntan. Tidak dapat dipungkiri bahwa mahasiswa akuntansi akan menjadi akuntan masa depan, yang berpartisipasi dalam perekonomian Indonesia dan menentukan masa depan akuntansi di Indonesia. Sehingga pembekalan nilai-nilai etika dalam pembelajaran akuntansi perlu ditingkatkan agar menciptakan akuntan yang bermoral. Jika konten etika akuntan Indonesia saat ini masih mengacu pada kode etik akuntan negara Barat yang tidak memasukkan nilai-nilai Ketuhanan, maka

dalam proses pembelajaran etika akuntan di bangku perguruan tinggi dan dalam kegiatan profesional akuntan dapat memasukkan nilai-nilai Ketuhanan sebagai materi pembelajaran. Bahkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia juga dapat *diinternalisasi* dalam pembelajaran etika akuntan (Ludigdo, 2012), sehingga tercipta mental akuntan Indonesia yang tidak terpacu pada *kapitalisme*. Selain pembelajaran etika akuntan, proses bisnis yang berlandaskan pada nilai keagamaan juga dapat mengendalikan *kapitalisme* dalam IFRS. Salah satu prinsip bisnis yang diturunkan dari nilai agama, yaitu agama Islam adalah akuntansi syariah. Dalam akuntansi syariah terdapat tiga prinsip umum, yaitu pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Penerapan prinsip umum akuntansi syariah dalam bisnis ini dapat mengurangi gejala *kapitalisme* yang hanya memihak pada kepentingan kelas tertentu (Triyuwono, 2000). Solusi selanjutnya dapat berupa pengembangan wacana akuntansi kritis yang mengkritisi *kapitalisme* dan ketidakadilan yang melekat dalam akuntansi dan adopsi IFRS. Wacana akuntansi kritis tersebut dapat menyadarkan akuntan dan pelaku bisnis lainnya tentang dampak buruk *kapitalisme* yang melekat dalam IFRS, sehingga diharapkan terjadi perombakan akuntansi menuju akuntansi yang berkeadilan dan Berketuhanan di masa depan.

### **KESIMPULAN**

*Kapitalisme* telah menguasai bisnis di Indonesia dan dunia, liberalisme yang berlebihan dan upaya maksimisasi laba dengan menghalalkan segala cara membawa risiko ketidakadilan, dehumanisasi, kemiskinan dan pengangguran. Sehingga *kapitalisme* sama seperti perangkap yang tidak berujung. Globalisasi dan perkembangan dunia bisnis mendorong IAI untuk mengadopsi *International Financial Reporting Standard* (IFRS). IFRS yang dilahirkan di negara penganut paham kapitalis tentu saja mengusung nilai-nilai kapitalisme sehingga mengarahkan akuntan dan pelaku bisnis di Indonesia untuk terus mereproduksi *kapitalisme* yang penuh dengan jebakan-jebakan maut. Adapun beberapa perangkap yang melekat pada *kapitalisme* dalam adopsi IFRS adalah (a) semakin terbukanya kesempatan

bagi pemilik modal asing untuk menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia, (b) semakin terbukanya peluang bagi sistem perekonomian *kapitalisme* untuk menggantikan sistem perekonomian keke luargaan yang diamanatkan oleh UUD 1945, (c) penggunaan *fair value accounting* dalam IFRS menyediakan instrumen bagi keserakahan akumulasi laba dan semakin membuka peluang bagi manipulasi informasi akuntansi, (d) semakin terbukanya peluang Indonesia untuk terlibat dalam pasar global sehingga memperlancar *'flow of things capitalism'*, yang berdampak pada akumulasi uang (laba) sebagai satu-satunya tujuan dan pengabaian "nilai" yang lain, termasuk nilai moral. Untuk mengurai perangkap *kapitalisme*, diperlukan pembelajaran etika akuntan yang menekankan pada nilai-nilai Ketuhanan dan nilai moral Pancasila yang merupakan jati diri dan pandangan hidup bangsa Indonesia, (b) pengembangan proses bisnis dan praktik akuntansi yang berlandaskan pada nilai keagamaan, serta (c) pengembangan wacana akuntansi kritis sebagai sarana penyadaran kepada akuntan dan pelaku bisnis tentang dampak buruk *kapitalisme*. Dengan melakukan tiga hal tersebut, akuntan Indonesia tidak terus memproduksi dan mereproduksi *kapitalisme* melainkan secara bertahap dapat mengurai perangkap *kapitalisme*

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Helmy. (2008). Akuntansi dan Kapitalisme. *Iqtishoduna Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 4 no 3.
- Belkaoui, Ahmed. (2000). *Teori Akuntansi*. Buku 1. terj. Marwata, dkk. Jakarta: Salemba Empat.
- Burchel, Stuart., Collin Clubb, Anthony Hopwood dan John Hughes. (1980). The Roles of Accounting in Organizations and Society. *Accounting, Organizations and Society Journal* Vol.5, No.1, Hal. 5-27.
- Capra, Fritjof. (2002). *The Hidden Connection: Integrating The Biological, Cognitive and Social Dimensions of Life into A Science of Sustainability*. Newyork: Doubleday Random House Inc.
- Chiapello, E. (2007). Accounting and The Birth of The Notion of Capitalism. *Critical Perspective of Accounting* 18, hal. 263-296.
- Dunne, Linea. (2012). Capitalism 4.0 and The Platititude That is Economic Growth. [www.linneadunne.com](http://www.linneadunne.com).
- Gamayuni, Rindu Rika. (2009). Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju Intenational Financial Reporting Standards. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol 14, No 2, Hal 153-166.
- Graham, Cameron dan Dean Neu. (2003). Accounting for Globalization. *Accounting Forum Journal*, Vol. 27, No. 4 Desember 2003, Hal. 449 – 471.
- Habermas, J., *Letigimation Crisis*, Polity Press, Cambridge Oxford, 1988.
- Hafizah, Yulia. (2004). Akuntansi Kapitalis dalam Kacamata Syariah. *Jurnal Al-Mawarid* XI Tahun 2004.
- Harahap, Sofyan S. (2001). *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2008). Grand Lauching Program Konfergensi IFRS. [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id) (diunduh pada 22 Juni 2017).
- Istianingsih. (2012). *Modul Teori Akuntansi*. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercubuana. [www.mercubuana.co.id](http://www.mercubuana.co.id) (diunduh pada 22 Juni 2017)
- Kaletsy, Anatole. (2010). Capitalism 4.0. *The Birth of a New Economy in the Aftermath of Crisis*. Newyork: Public Affairs.
- Martani, Dwi. (2008). *Perkembangan PSAK dan Peran IAI dalam Perkembangan PSAK*. [staff.blog.ui.ac.id/martani](http://staff.blog.ui.ac.id/martani) (diunduh pada 23 Juni 2017).
- Mulawarman, Aji Dedi. (2009). *IFRS: Sekularisasi dan Neoliberalisme Akuntansi*. [ajidedim.wordpress.com](http://ajidedim.wordpress.com) (diunduh pada 23 Juni 2017).

- Nawatmi, Sri. (2009). Kerapuhan Sistem Kapitalis. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol.1, No. 1, Hal. 29-38.
- Pales, Vera. (2015). Standardizing Financial Reporting Regulation: What Implications for Varieties of Capitalism? *Working Paper Series Center for International Studies Cornell University*.
- Priyono. (2007.) Adam Smith dan Munculnya Ekonomi. Dari Filsafat Moral ke Ilmu Sosial. *Jurnal Diskursus*, Vol. 6, No. 1, April 2007, Hal.1-40.
- Richard, Jacques. (2015). The Dangerous Dynamics of Modern Capitalism (from Static to IFRS' Futuristic Accounting). *Critical Perspectives on Accounting* 30 , Hal. 9-34.
- Sulistiyowati, Wiwit Apit.(2010). Sekulerisasi dan Neoliberalisme Melalui Harmonisasi Standar Akuntansi Internasional. *Jurnal Permana* Vol. 2, No.1.
- Stojilkovic, Milorad. (2010). Fair Value Accounting-The Beginning of The End. *Economics and Organization Journal* Vol 7, No.2, Hal. 163-177.
- Triyuwono, Iwan. (2000). *Akuntansi Syari'ah: Paradigma Baru dalam Wacana Akuntansi*. Materi Seminar Nasional Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 11-13 Mei 2000.